Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pembuatan penelitian ilmiah ini, peneliti banyak merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu untuk memperkaya pengetahuan terkait topik literasi media dan informasi, kompetensi kewarganegaraan, serta hubungan di antara keduanya. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan berkontribusi dalam pembuatan penelitian ini:

1. *How Media Literacy Supports Civic Engagement in a Digital Age* (Marten dan Hobbs, 2015)

Penelitian pertama merupakan artikel ilmiah berjudul *How Media Literacy Supports Civic Engagement in a Digital Age*. Penelitian tahun 2015 yang dibuat oleh Hans Marten dan Renee Hobbs ini hendak melihat bagaimana pendidikan literasi media dapat menunjang motif dalam mencari informasi dan mendukung pengembangan kompetensi keterlibatan warga negara dalam hubungannya dengan media digital. Keterlibatan warga negara di sini dipandang dalam arti konvensionalnya yaitu partisipasi dalam politik, tapi juga mengacu pada dengan hubungan masyarakat dengan lingkungan sosial mereka (Martens & Hobbs, 2015, p. 120).

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa anak muda bisa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait keterlibatan warga negara melalui pendidikan formal dan informal. Salah satunya melalui pendidikan literasi media

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

yang memberikan pengetahuan mengenai media, kemampuan analisis pesan, dan keterampilan komposisi dan kolaborasi, yang merupakan kompetensi penting untuk menjadi warga negara yang aktif dalam menanggapi berita dan isu saat ini (Martens & Hobbs, 2015, p. 121).

Penelitian ini didasari oleh konsep literasi digital dan media yang didefinisikan Hobbs (2010) sebagai seperangkat kompetensi yang terdiri atas kemampuan untuk memilih dan mengakses informasi secara bertanggung jawab, menganalisis pesan yang ada dalam berbagai format, membuat konten dalam berbagai format, merefleksikan tingkah laku dan kebiasaan komunikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan etika, serta melakukan aksi sosial secara individu atau kolaborasi untuk membagikan ilmu dan memecahkan masalah dalam keluarga, lingkungan kerja, dan negara dengan berpartisipasi sebagai anggota komunitas (Martens & Hobbs, 2015, p. 121).

Selanjutnya, Martens dan Hobbs juga menjelaskan konsep keterlibatan warga negara dan keterkaitannya dengan media digital. Menurut Flanagan, Syvertsen, dan Stout (2007), keterlibatan warga negara dapat diukur melalui perilaku sipil, sikap terhadap pemerintah, partisipasi dalam dialog politik, penggunaan dan wawasan media, kemauan untuk terlibat dalam aksi-aksi kewarganegaraan, dan pengetahuan kewarganegaraan (Martens & Hobbs, 2015, p. 124). Beberapa peneliti beranggapan bahwa media digital menyebabkan anak muda kurang terlibat dalam ruang publik. Namun di sisi lain, media digital juga dapat berperan sebagai sarana bagi anak muda untuk mengekspresikan diri yang

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan warga negara (Martens & Hobbs, 2015, p. 124).

Martens dan Hobbs menerapkan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kuasi eksperimen dengan 2x2 struktur faktor (Martens & Hobbs, 2015, p. 125). Faktor pertama membandingkan kelompok siswa yang mengikuti program pendidikan literasi media dan mereka yang tidak terlibat di dalamnya. Sementara faktor lainnya membandingkan kelompok siswa yang mengikuti program pendidikan literasi media dengan penerimaan terbuka (*open admission*) dan mereka yang mengikuti program pendidikan literasi media dengan penerimaan terbatas (*selective admission*). Dengan meneliti dua kelompok ini, Martens dan Hobbs dapat mempelajari perilaku penggunaan media dan keterampilan analisis media pada kelompok dengan perbedaan tingkat akademik (Martens & Hobbs, 2015, p. 125).

Penelitian ini dilakukan kepada 507 siswa SMA kelas 11 di wilayah Mid-Atlantic, Amerika Serikat. Rentang usia sampel penelitian ini adalah 15-19 tahun. Para siswa diberikan kuesioner berbasis kertas untuk menguji pengetahuan media, keterampilan analisis media, dan keterlibatan kewarganegaraan mereka (Martens & Hobbs, 2015, p. 125). Dari 507 kuesioner yang diisi oleh para siswa, 107 di antaranya dianggap tidak valid sehingga angka sampel terakhir berjumlah 400 orang (Martens & Hobbs, 2015, p. 126).

Dalam menganalisis data, Martens dan Hobbs membandingkan mean atau rata-rata antarvariabel, kemudian menghitung hubungannya dengan korelasi

Pearson product-moment, diikuti dengan multiple linear regression (Martens & Hobbs, 2015, p. 129).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan media dan keterampilan analisis media memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat pendidikan siswa dan partisipasi dalam program pendidikan literasi media (Martens & Hobbs, 2015, p. 130). Sementar itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya waktu yang dihabiskan di internet tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi warga negara (Martens & Hobbs, 2015, p. 131). Di sisi lain, motif pencarian informasi dan keterampilan analisis media justru memiliki pengaruh yang kuat dengan keterlibatan warga negara (Martens & Hobbs, 2015, p. 132).

2. *Learning to Engage: How Positive Attitudes about the News, Media Literacy, and Video Production Contribute to Adolescent Civic Engagement* (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013)

Penelitian kedua juga merupakan artikel ilmiah berjudul *Learning to Engage: How Positive Attitudes about the News, Media Literacy, and Video Production Contribute to Adolescent Civic Engagement* tahun 2013. Jurnal ilmiah ini merupakan karya Renee Hobbs, Katie Donnelly, Jonathan Friesem, dan Mary Moen. Penelitian ini hendak mengkaji hubungan antara keterlibatan warga negara dan partisipasi dalam berbagai praktik pembelajaran multimedia di kelas produksi video SMA (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 1). Dalam mengkaji hubungan antara kedua variabel ini, para peneliti juga menemukan aspek-aspek

lain yang turut memengaruhi keterlibatan warga negara, yaitu literasi media dan sikap positif terhadap berita.

Penelitian ini menyebutkan bahwa kelas produksi konten media telah lama disarankan untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan di Amerika Serikat. Para ahli menyebutkan bahwa kelas ini dapat mendukung perkembangan literasi, keterlibatan warga negara, serta ketertarikan pada berita dan isu-isu masa kini (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 2). Produksi konten media ini merupakan bagian dari literasi media karena dapat mengajarkan siswa untuk membuat pesan lewat berbagai media dan teknologi. Lewat pembelajaran produksi konten media, siswa dapat memahami hubungan antara informasi, pengetahuan, dan kekuatan media (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 2).

Beberapa SMA di Amerika Serikat telah memiliki kelas produksi konten media dalam bentuk video yang mengajarkan produksi animasi dan film, siaran berita, serta desain *video game*. Hobbs, Donnelly, Friesem, dan Moen (2013, p. 3) merasa penting untuk mencari tahu keterampilan apa saja yang didapatkan dari pendidikan produksi video, dan bagaimana keterampilan-keterampilan tersebut memengaruhi keterlibatan warga negara.

Hobbs, Donnelly, Friesem, dan Moen menyebutkan bahwa (2013, p. 4) kelas produksi video mengajarkan keterampilan teknis dan non-teknis, yang dapat meningkatkan motif, keterlibatan siswa, serta ketertarikan pada konten. Tugas dalam kelas ini biasanya dibuat dalam kelompok sehingga setiap orang bisa mengembangkan spesialisasinya masing-masing, baik itu dalam bidang

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

sinematografi, penyuntingan video, penampilan di depan kamera, audio dan lain-lain. Sementara literasi media dijelaskan oleh Hobbs, Donnelly, Friesem, dan Moen (2013, p. 5) sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, membuat, dan membagikan pesan dalam masyarakat digital, global, dan demokratis. Keterampilan literasi media merupakan hal yang penting dimiliki oleh semua orang di abad ke-21. Dengan anggapan bahwa pendidikan produksi video juga merupakan bagian dari literasi media yang mengajarkan kemampuan produksi pesan media, maka para siswa dalam kelas tersebut seharusnya juga dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 5).

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode survei dalam proses pengumpulan datanya. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 siswa sekolah Thurston High School di daerah Detroit, Michigan. Kuesioner berisi serangkaian pernyataan *self-report* tentang ketertarikan berkarier di industri media, keterampilan teknis dan non-teknis produksi video yang didapatkan, aktivitas produksi media yang dilakukan, keterlibatan warga negara, literasi media, dan sikap terhadap media (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 7).

Untuk mempelajari variabel keterampilan yang didapatkan dari kelas produksi video, responden diminta memberikan penilaian atas keterampilan teknis dan non-teknis mereka di berbagai bidang produksi video dalam skala penilaian sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 7). Sementara untuk mengetahui aktivitas

produksi video apa saja yang dilakukan siswa dalam pelajaran di kelas selama satu semester, para peneliti memberikan serangkaian pernyataan *self-report* terkait berbagai aktivitas pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 8). Untuk mengukur variabel keterlibatan warga negara, para responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan seputar aksi yang melibatkan ruang publik dan kepentingan banyak orang dalam skala likert sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 9). Sementara dalam mengukur variabel literasi media, para responden diminta memberikan penilaian terhadap beberapa buah pernyataan terkait peran, fungsi, dan sifat media (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 9).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para siswa mengaku mendapatkan lebih banyak keterampilan produksi video non-teknis dibandingkan keterampilan teknis. Keterampilan non-teknis ini di antaranya adalah menggunakan internet untuk mencari informasi, membandingkan fakta dan opini, serta tampil di depan kamera (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 11).

Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda-beda meski ada dalam kelas pendidikan produksi video yang sama. Hal ini dikarenakan tugas-tugas dalam kelas produksi video biasanya merupakan proyek kelompok sehingga terdapat perbedaan dalam aktivitas produksi yang masing-masing siswa lakukan (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, p. 11). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para siswa lebih

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produksi dibandingkan kegiatan pra-produksi dan pasca produksi.

Selain itu, penelitian mendapati bahwa keterlibatan warga negara berhubungan dengan sikap positif terhadap berita, literasi media, dan aktivitas pra-produksi dalam kelas. Sementara itu, variabel kegiatan produksi dan pasca produksi, sinisme terhadap media, persepsi terhadap kepentingan media, nilai positif dalam berita, dan ketertarikan terhadap jurnalisme tidak berhubungan dengan keterlibatan warga negara (Hobbs, Donnelly, Friesem, & Moen, 2013, pp. 12-13).

3. *Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy* (Mihailidis dan Thevenin, 2013)

Penelitian ketiga merupakan artikel ilmiah karya Paul Mihailidis dan Benjamin Thevenin yang berjudul *Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy*. Artikel ilmiah ini dipublikasikan oleh Sage Publications dalam jurnal American Behavioral Scientist pada tahun 2013. Topik yang dibahas di dalamnya terkait perubahan bentuk keterlibatan warga negara yang dipicu oleh perkembangan media dan teknologi. Keterlibatan warga yang tadinya ditunjukkan melalui bentuk-bentuk partisipasi umum seperti menjadi anggota dalam kelompok sosial, mengikuti pemilihan umum, dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan warga, saat ini telah berkembang ke dalam bentuk advokasi *online* dan partisipasi *online* lainnya melalui *liking*, *sharing*, dan *remixing* (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1611). Untuk bisa memanfaatkan secara maksimal bentuk partisipasi baru yang mengandalkan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

media dan teknologi ini, masyarakat membutuhkan pendidikan literasi media. Artikel ilmiah ini menjelaskan bagaimana literasi media merupakan kunci utama dari keterlibatan warga dalam demokrasi. Selain itu, kerangka kompetensi literasi media yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara partisipatif juga dijelaskan dalam artikel ini.

Dalam menyusun kerangka kompetensi literasi media, Mihailidis dan Thevenin terlebih dahulu menjelaskan konsep keterlibatan warga negara. Indikator keterlibatan warga negara dulunya mencakup menjadi anggota dalam kelompok sosial, mengikuti pemilihan umum, dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan warga. Namun dengan dorongan perkembangan teknologi dan media, partisipasi warga lebih banyak kita temukan dalam bentuk gerakan-gerakan sosial yang diorganisasikan melalui platform media sosial (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1612).

Menyikapi perkembangan bentuk keterlibatan warga negara di zaman modern ini, beberapa peneliti mulai merumuskan arti baru dari keterlibatan warga negara. Salah satunya adalah Dalton (2009) yang menjelaskan bahwa saat ini warga negara, terutama anak muda, telah mengambil peran partisipatif yang melebihi konsep "*citizen duty"* (ikut pemilihan umum, membayar pajak, menaati hukum) tapi telah menganut konsep "*engaged citizenship*" di mana bentuk partisipasi dilakukan secara independen namun tetap memerhatikan kepentingan bersama. Senada dengan Dalton, Loader (2007) menyebutkan bahwa partisipasi anak muda ditunjukkan dalam berbagai aksi seperti *flash mob*, reportase warga,

petisi *online*, penggalangan dana *online*, dan lain-lain (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1613).

Selanjutnya, artikel ilmiah ini menjelaskan peran literasi media dalam mengembangkan keterlibatan warga negara. Mihailidis dan Thevenin mengutip Len Masterman (1985) yang menyatakan bahwa literasi media diperlukan supaya warga negara memiliki kemampuan untuk membuat keputusan rasional, menjadi agen perubahan yang efektif, dan memiliki keterlibatan yang efektif dengan media. Maka dapat dikatakan bahwa edukasi media merupakan langkah penting dalam mencapai demokrasi partisipasi yang sebenarnya. Hasil dari literasi media tersebut adalah terciptanya pemikir kritis, kreator dan komunikator, dan agen perubahan yang merupakan kompetensi utama untuk mengembangkan keterlibatan warga negara (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1614).

Mihailidis dan Thevenin menyusun kerangka kompetensi literasi media sebagai kunci dari keterlibatan warga negara. Kerangka ini terdiri atas dimensi kompetensi dalam partisipasi, kompetensi dalam kolaborasi, kompetensi dalam berekspresi, dan kompetensi kritis. Kompetensi dalam partisipasi berfokus pada kemampuan menggunakan konten media untuk mendukung partisipasi baik secara *online* maupun dalam komunitas lokal, nasional, dan global Sementara kompetensi dalam berkolaborasi merupakan kesadaran atas kapasitas warga negara dalam membentuk hubungan dan mengkomunikasikan pendapat mereka kepada anggota masyarakat lain. Kompetensi dalam berekspresi meliputi pembuatan dan penyebaran konten lewat media. Konten yang dibuat dan dibagikan ini dapat membentuk ruang publik di mana masyarakat bisa sama-sama

belajar dan menemukan suara mereka dalam dialog terkait kewarganegaraan. Sementara kompetensi kritis yang merupakan kemampuan masyarakat untuk mengakses, mengevaluasi, dan menganalisis secara kritis pesan-pesan media yang mereka temukan dalam hidup sehari-hari (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1618).

Keempat dimensi yang menyusun kerangka kompetensi literasi media tersebut dipercaya dapat menghasilkan pemikir kritis, kreator dan komunikator yang handal, serta agen perubahan sosial; dan juga membantu membangun kehidupan demokrasi yang berkelanjutan, toleran, dan partisipatif di era digital ini (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1619). Kerangka ini secara keseluruhan bermaksud membekali masyarakat dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan platform digital sehingga mereka dapat berekspresi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan terlibat dalam kehidupan demokrasi (Mihailidis & Thevenin, 2013, p. 1618).

Ketiga penelitian terdahulu ini memberi gambaran penting terhadap hubungan antara literasi media dan keterlibatan warga negara. Penelitian-penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pendidikan berperan penting dalam meningkatkan literasi media. Dalam penelitian terdahulu ini, para peneliti belum menggunakan konsep literasi media dan informasi sehingga keterampilan akses, evaluasi, dan kreasi hanya berfokus pada konten media dan tidak melibatkan bentuk-bentuk informasi lainnya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengkaji tingkat literasi media dan informasi dalam bentuk baru yang telah mengintegrasikan kompetensi dalam literasi media dengan literasi informasi dan literasi digital.

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

Dalam membahas keterlibatan warga negara, penelitian-penelitian terdahulu ini juga lebih berfokus pada partisipasi masyarakat saja. Padahal keterlibatan warga negara juga mencakup sikap dan pandangan masyarakat terhadap keadilan sosial, sikap masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga pengetahuan mereka terkait demokrasi negara. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan alat ukur CCCI-2 yang mengkaji nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan sosial, sikap terhadap partisipasi, dan pengetahuan demokrasi untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan.

Dengan menggunakan alat ukur yang lebih lengkap, baik dalam menghitung tingkat literasi media dan informasi maupun kompetensi kewarganegaraan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan hasil yang lebih menggambarkan kondisi masyarakat saat ini. Pembahasan yang dilakukan pada tiap-tiap dimensi baik dalam variabel literasi media dan informasi maupun kompetensi kewarganegaraan juga menjadikan penelitian ini lebih terperinci sehingga jelas dalam dimensi mana peningkatan harus dilakukan.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Literasi Media dan Informasi

Literasi media dan informasi atau biasa disingkat sebagai LMI merupakan gabungan dari tiga literasi, yaitu literasi media, literasi informasi, dan literasi digital/ICT (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 27). Istilah LMI memang belum terlalu populer digunakan di Indonesia bila dibandingkan dengan literasi-literasi yang membentuknya. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan literasi media, literasi informasi,

maupun literasi digital sebagaimana disebutkan dalam Guntarto (2016) serta Kurnia dan Astuti (2017).

Untuk dapat memahami konsep literasi media dan informasi, kita perlu terlebih dahulu mengkaji proses terbentuknya literasi ini. Proses pembentukan LMI tidak terlepas dari perkembangan literasi media. Istilah literasi media sendiri pertama kali didefinisikan dalam *The National Leadership Conference on Media Literacy* sebagai kemampuan masyarakat untuk mengakses, menganalisis, dan memproduksi informasi untuk hasil tertentu (Aufderheide, 1993, p. 6). Informasi di sini dapat diartikan sebagai simbol-simbol biasa maupun konten media, dari cetak, video, hingga konten media digital (Aufderheide, 1993, p. 7). Definisi literasi media ini kemudian menjadi definisi yang memayungi sejumlah definisi dari para ahli, seperti Livingstone (2004), Buckingham (2005), Jenkins (2009), dan Potter (2014).

Potter (2014, p. 4) menyebutkan bahwa literasi media semakin dibutuhkan masyarakat dengan melimpahnya informasi dalam media yang terus bertambah dalam waktu cepat Selain banyaknya informasi, intensitas paparan pesan-pesan media juga semakin tinggi. Paparan pesan media tersebut bisa membentuk penilaian dan cara berpikir masyarakat (Diao, 2014, p. 5). Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan literasi media untuk membantu menyeleksi informasi yang tersedia (Potter, 2014, p. 7). Literasi media juga dapat menyadarkan masyarakat dari *automatic state* (kondisi otomatis) di mana media mengkondisikan masyarakat untuk mengkonsumsi pesan-pesan tertentu saja yang belum tentu penting (Potter, 2014, p. 11). Dengan demikian, masyarakat akan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

memiliki keinginan yang lebih besar untuk memperoleh pesan-pesan media yang lebih beragam dan bermanfaat bagi dirinya (Potter, 2014, p. 29).

Dengan perkembangan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, ditambah dengan tantangan dan tuntutan zaman, konsep literasi media tersebut berkembang menjadi literasi media dan informasi. Perkembangannya ditandai dengan kaburnya batasan dengan literasi-literasi lain, seperti literasi informasi dan literasi digital. UNESCO (2005) mengartikan literasi informasi sebagai kemampuan untuk menyadari kebutuhan akan informasi, mengindentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, serta memanfaatkan dan mengkomunikasikannya secara efektif, legal, dan etis (Diao, 2014, p. 2). Literasi informasi dapat membantu masyarakat dalam menemukan dan merumuskan masalah serta memecahkannya lewat pengumpulan dan penggunaan informasi (Diao, 2014, pp. 2-3). Dengan literasi informasi, masyarakat juga diharapkan dapat bersaing di era globalisasi. Oleh sebab itu, literasi informasi perlu diimplementasikan dalam kurikulum berbasis kompetensi yang mewajibkan peserta didik untuk memanfaatkan banyak sumber informasi dalam berbagai format (Diao, 2014, p. 3).

Sementara literasi digital diartikan oleh Jones dan Hafner (2013) sebagai praktik berkomunikasi, berhubungan, berpikir, dan membiasakan diri dengan media digital (Kurnia & Astuti, 2017, p. 152). Lebih lanjut lagi, Scollon (2001) dan Wertch (1993) menjelaskan bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan mengoperasikan perangkat elektronik seperti komputer dan telepon

genggam, tapi juga kemampuan beradaptasi dengan keterjangkauan dan keterbatasan alat-alat ini dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, literasi digital dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang mengarah pada mediasi antara teknologi dengan khalayak atau *user* untuk dapat mempraktikkan teknologi digital secara produktif (Kurnia & Astuti, 2017, p. 154).

Batasan antara literasi media, literasi informasi, dan literasi digital menjadi kabur seiring dengan perkembangan teknologi dan terciptanya dunia maya dengan segala peluang, risiko, dan ancaman di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat perlu dibekali dengan literasi media, digital, dan informasi supaya bisa meminimalisir risiko terkait reliabilitas sumber informasi, privasi, keamanan, dan isu etik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana informasi dan konten media dibuat, siapa yang membiayainya, dan bagaimana konten tersebut dievaluasi dan dibagikan sehingga bisa diakses (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 26). Kebutuhan atas kemampuan-kemampuan inilah yang mendorong UNESCO untuk mengintegrasikan literasi media, informasi, dan digital menjadi literasi media dan informasi.

Literasi media dan informasi sendiri merupakan sekelompok kompetensi yang memberdayakan masyarakat untuk dapat mengakses, mengambil, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan, sekaligus membuat dan membagikan informasi dan konten media dalam berbagai format. Seluruh tindakan ini dilakukan dalam cara yang etis dan efektif supaya masyarakat dapat berpartisipasi dan terlibat dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 29).

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, LMI terbentuk dari gabungan tiga literasi, yaitu literasi media, literasi informasi, dan literasi digital/ICT (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 27). Penggabungan ketiga literasi ini didasari oleh perkembangan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat di abad 21 dalam mengakses dan mengevaluasi informasi dari berbagai platform media menggunakan teknologi digital yang terus berkembang (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 29).

Literasi media, literasi informasi, dan literasi digital yang tergabung ke dalam LMI memiliki kesamaan dalam (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 30):

- Mendukung hak asasi manusia, terutama hak kebebasan berekspresi dan hak mendapatkan akses informasi
- Menekankan pentingnya evaluasi informasi dan konten media, sekaligus mendapatkan pemahaman atas fungsi media dan penyedia informasi dalam masyarakat
- Menghitung kemampuan orang dalam mengakses, mengevaluasi, membuat, dan membagikan informasi dan pesan media melalui berbagai cara termasuk teknologi informasi.
- Memiliki nilai penting bagi masyarakat karena memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga bisa dilibatkan dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sebagai kontributor yang sepadan.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

- Membekali orang dengan kompetensi yang dibutuhkan di kehidupan abad 21, seperti kemampuan mengolah data, informasi, dan pesan media yang datang dari berbagai platform komunikasi dan informasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, LMI memiliki beberapa manfaat utama yang dapat dirangkum menjadi (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 36):

- Meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan mendorong masyarakat untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat.
- Menyediakan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat abad 21 untuk menanggapi tantangan, risiko, dan kesempatan baru yang ditimbulkan dari perkembangan media, informasi, dan teknologi informasi dalam ruang lingkup personal, sosial, dan profesional.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan atas fungsi media dan penyedia informasi dalam kehidupan masyarakat demokrasi.
- Membantu masyarakat memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk mengakses informasi dan konten media, mengevaluasi performa media dan penyedia informasi dalam kaitannya dengan fungsinya, serta membuat dan membagikan informasi lewat cara yang etis dan efektif.
- Membantu meningkatkan kompetensi LMI di tingkat institusi maupun individu dengan membangun lingkungan yang mendukung LMI di tingkat nasional.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

UNESCO juga menekankan bahwa LMI dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kompetensi yang dapat meningkatkan permintaan publik atas lingkungan yang lebih mendukung perkembangan LMI dalam kaitannya dengan konten, jasa, dan produk yang baru, sekaligus ketersediaan lapangan pekerjaan dan terlaksananya musyawarah yang memungkinkan pembangunan negara yang berkelanjutan dan damai (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 36). Dengan kompetensi LMI masyarakat diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, adanya transparasi dalam masyarakat, dan dapat mengatasi masalah kemiskinan, ekonomi, dan sosial.

Kerangka pengukuran LMI yang dikembangkan UNESCO terdiri atas dua tingkatan, yaitu pengukuran kesiapan negara dan pengukuran kompetensi LMI (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 47). Kesiapan negara merupakan istilah yang dipakai UNESCO untuk mendeskripsikan level kesiapan suatu negara untuk mengembangkan literasi media dan informasi pada tingkat nasional (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 51). Kerangka tingkat pertama ini digunakan untuk mendapatkan gambaran kondisi suatu negara terkait kebijakan, infrastruktur, dan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan kompetensi LMI. Kesiapan negara sendiri terdiri atas dimensi media dan informasi dalam pendidikan, kebijakan terkait media dan informasi, persediaan media dan informasi, akses dan penggunaan media dan informasi, dan masyarakat sipil (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 51).

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

Namun fokus penelitian ini ada pada tingkat kompetensi LMI masyarakat, bukan kesiapan negara. Oleh karena itu, tingkatan yang relevan untuk diaplikasikan adalah tingkat kedua yang merupakan kerangka pengukuran kompetensi LMI masyarakat. Dalam hal ini, kompetensi sendiri diartikan sebagai kemampuan untuk mengerahkan dan menggunakan kemampuan internal yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap (prinsip dan nilai), serta memanfaatkan sumber-sumber eksternal seperti *database*, kolega, perpustakaan, peralatan, dan instrumen lainnya untuk memecahkan masalah sehari-hari secara efektif (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 55). Untuk menghitung kompetensi LMI ini, UNESCO merumuskan tiga buah dimensi yang terdiri atas dimensi akses; pemahaman dan evaluasi; serta kreasi (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 47).

Dimensi akses berfokus pada kemampuan mengakses, mendapatkan, dan menyimpan informasi dan konten media menggunakan teknologi yang sesuai. Kemampuan yang ada di dalamnya termasuk kemampuan untuk memahami pentingnya informasi, konten media, dan pengetahuan; diikuti dengan kemampuan untuk mengenali informasi dan konten media yang bermanfaat dari berbagai sumber dan fomat untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 57). Berbagai kemampuan yang ada dalam dimensi akses dirumuskan ke dalam beberapa indikator yang terdiri atas indikator pemahaman atas informasi yang dibutuhkan; pencarian dan penemuan informasi dan konten media; akses pada informasi, konten media, dan penyedia informasi; serta pengambilan dan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

penyimpanan informasi dan konten media (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 58).

Sementara dimensi pemahaman dan evaluasi diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis secara kritis, dan mengevaluasi informasi, konten media, serta tugas dan fungsi institusi media dan informasi dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan asas kebebasan. Kemampuan yang termasuk ke dalam dimensi ini adalah kemampuan membandingkan fakta, membedakan fakta dan opini, memahami adanya nilai dan ideologi di balik suatu informasi, serta memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, politik, profesionalitas, dan teknologi memengaruhi isi konten media dan informasi. Selain itu, pemahaman yang dimaksud di sini juga bukan sekadar pemahaman akan konten media, tapi juga pemahaman atas peran media dan informasi dalam mendukung terciptanya kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kebebasan akses. Pemahaman dan evaluasi atas hal-hal inilah yang dapat menciptakan kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Di tengah banjir informasi, pemahaman atas pentingnya teknik pengorganisasian informasi dan konten media juga penting dimiliki (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 57). Dimensi pemahaman dan evaluasi juga tersusun atas beberapa indikator, yaitu indikator pemahaman atas informasi dan media; penilaian atas informasi, konten media, dan penyedia informasi; evaluasi terhadap informasi, konten media, dan penyedia informasi; serta pengelolaan informasi dan konten media (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 58).

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Dimensi ketiga dalam kompetensi LMI adalah dimensi kreasi yang merupakan kemampuan untuk memahami teknik produksi informasi, konten media, dan pengetahuan, yang diikuti dengan kemampuan untuk mengkomunikasikannya dengan efektif. Dimensi ini juga berbicara mengenai pemanfaatan media, informasi, dan teknologi informasi dengan cara-cara yang etis dalam kaitannya dengan hak cipta. Hal ini merupakan bagian penting dari dimensi kreasi mengingat perkembangan teknologi di abad 21 memungkinkan siapa saja menjadi kreatif serta inovatif melalui pembuatan dan penyebaran konten media dan informasi. Kemampuan untuk melakukan pemantauan terhadap kekuatan pengaruh informasi dan pesan media juga merupakan bagian dari dimensi ini (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 57). Seperti dua dimensi lainnya, dimensi kreasi juga memiliki beberapa indikator untuk mengukur kemampuan-kemampuan yang telah disebutkan di atas. Indikator dalam dimensi ini adalah indikator produksi informasi, konten media, dan ekspresi kreatif; penyampaian informasi, konten media, dalam cara yang etis dan efektif; partisipasi dalam aktivitas publik sebagai masyarakat yang aktif; serta indikator pemantauan terhadap pengaruh dari produksi informasi, konten media, pengetahuan, serta penyedia informasi. (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 58).

UNESCO menyusun kerangka pengukuran LMI terutama untuk menghitung tingkat literasi media dan informasi guru, baik yang telah mengajar maupun dalam pelatihan. Hal ini dikarenakan guru dianggap berperan besar dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dengan cara membimbing, mengajar, dan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

melatih calon pemimpin dan agen perubahan masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan agar guru memiliki kompetensi yang mencukupi di bidang LMI. Namun UNESCO menegaskan bahwa penggunaan kerangka pengukuran LMI tetap tidak terbatas pada kelompok guru saja, melainkan bisa juga digunakan pada kelompok-kelompok sosial lainnya (Global Media and Information Literacy Assesment Framework, 2013, p. 48).

2.2.2 Warga Negara Aktif

Menurut Hoskins (2006), warga negara aktif merupakan warga negara yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, komunitas, dan/atau politik, yang dilakukan dengan rasa saling menghormati dan tanpa kekerasan, serta sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan semangat demokrasi (Hoskins, et al., 2006, p. 10). Dalam pengertian ini, partisipasi didefinisikan dalam arti luas yang tidak terbatas pada lingkup politik saja, melainkan juga mencakup partisipasi di bidang budaya, sosial, hingga lingkungan hidup dalam skala lokal, regional, dan nasional (Hoskins, et al., 2006, pp. 10-11). Definisi yang disampaikan Hoskins di atas juga menyoroti keberadaan batasan-batasan etis dalam bentuk semangat demokrasi dan HAM yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menjalankan perannya sebagai warga negara aktif. Oleh karena itu, partisipasi dalam kelompok-kelompok ekstrimis yang mempromosikan intoleransi dan kekerasan tidak termasuk ke dalam konsep masyarakat sebagai warga negara aktif (Hoskins, et al., 2006, p. 11).

Peran warga negara aktif –baik di dalam maupun di luar dunia politik– memang sangat penting dalam mendukung terlaksananya demokrasi dan

pemerintahan yang berkualitas. Faktanya, demokrasi tidak bisa bertahan dengan hanya mengandalkan keberadaan institusi pemerintahan dan hukum. Masyarakat perlu terlibat, misalnya dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk mengawasi kinerja pemerintah dan pejabat terkait (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 10). Orang-orang ini pula yang dapat menggerakkan massa untuk melakukan penandatanganan petisi, pelaksanaan kampanye maupun demonstrasi demi memperjuangkan keadilan sosial. Aksi-aksi lain yang lebih menjurus ke ranah politik, seperti terlibat dalam pemungutan suara, menjadi kandidat dalam pemilihan umum, atau menghubungi pejabat terkait suatu isu juga termasuk ke dalam konsep warga negara aktif.

Saat ini, negara-negara Barat mulai menaruh perhatian khusus pada keterlibatan masyarakat yang terus mengalami penurunan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 10). Mereka yang tidak berpartisipasi terutama ada dalam kelompok anak muda. Bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi muda ini dapat dikatakan tidak siap menjalankan tugas-tugasnya sebagai warga negara aktif yang sebenarnya sangat penting bagi kehidupan berdemokrasi (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, pp. 10-11). Padahal, saat ini keterlibatan anak muda semakin dibutuhkan dengan kemunculan krisis ekonomi di berbagai belahan Eropa. Krisis ekonomi ini menimbulkan masalah-masalah baru di mana sumber daya yang ada tidak lagi cukup untuk membiayai sektor publik sehingga beban ekonomi dilimpahkan kepada masyarakat. Sebagai akibatnya, Willetts (2010) menyatakan bahwa generasi saat ini dapat kehilangan keuntungan-keuntungan yang dimiliki generasi sebelumnya dalam hal lapangan pekerjaan,

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

pendidikan, kesehatan, dan masa pensiun (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11). Oleh karena itu, anak muda harus lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai pengambilan keputusan, bukan menjauhkan diri dan malah melakukan protes yang diwarnai kekerasan ketika keputusan yang dihasilkan tidak sesuai. Apalagi, anak muda sebenarnya memiliki kelebihan dalam hal keterampilan penggunaan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan massa untuk melaksanakan aksi demonstrasi demi kepentingan bersama.

Kecemasan atas tingkat partisipasi anak muda juga terjadi di Asia. Para peneliti mengkhawatirkan sifat anak muda yang apatis, egois, tidak peduli pada masalah-masalah sosial, dan kurang tertarik dengan dunia politik (Welsh, Kai-Ping, Yun-Han, Jungmin, Brand, & Pant, 2014, p. 54). Kecemasan ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak muda di Asia Timur dan Asia Tenggara memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pemilihan umum maupun keterlibatan dalam partai politik (Welsh, Kai-Ping, Yun-Han, Jungmin, Brand, & Pant, 2014, p. 57). Bentuk partisipasi lainnya seperti aksi unjuk rasa, pengisian petisi, atau kontak langsung dengan pemerintah atau pembuat kebijakan juga tidak banyak dilakukan oleh anak muda. Bahkan, tingkat partisipasinya kurang dari 50% (Welsh, Kai-Ping, Yun-Han, Jungmin, Brand, & Pant, 2014, p. 58). Padahal, anak muda memegang peranan penting sebagai agen perubahan dalam proses untuk untuk memastikan pemerintahan yang lebih baik dan tercapainya solusi yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah kebijakan publik (Welsh, Kai-Ping, Yun-Han, Jungmin, Brand, & Pant, 2014, p. 3).

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Melihat pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberlangsungan demokrasi, maka diperlukan serangkaian kompetensi sebagai standar kualitas yang harus dimiliki warga negara aktif yang kompeten (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11). Kompetensi ini dikenal dengan sebutan kompetensi kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 10).

2.2.3 Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan merupakan sekelompok pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara aktif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11). Kompetensi ini disepakati oleh negara-negara anggota Uni-Eropa –seperti disebutkan dalam European Parliament and Council (2006)– sebagai salah satu kompetensi yang bisa diperoleh lewat edukasi dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kohesi sosial, menjadi warga negara yang aktif, serta mendapatkan kemampuan bekerja dalam masyarakat yang berpengetahuan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11).

Kompetensi kewarganegaraan berfokus pada pengetahuan dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, serta pengetahuan terkait peristiwa bersejarah maupun isu-isu masa kini. Kompetensi kewarganegaraan juga memberi penekanan pada keanekaragaman yang ditunjukkan melalui pemahaman atas perbedaan suku bangsa dan agama. Hal-hal lain yang digarisbawahi dalam kompetensi kewarganegaraan adalah kemampuan berpikir kritis dan efektif, serta kemauan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, misalnya dalam pemilihan umum (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 11).

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

Kompetensi kewarganegaraan dapat diperoleh melalui pembelajaran formal di sekolah, non-formal di tempat-tempat pelatihan, maupun secara informal dari media (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 13). Pembelajaran juga bisa didapatkan melalui pengalaman dalam berbagai konsep sosial yang dikenal dengan konsep *life-wide learning*. Selain itu, pembelajaran terkait kompetensi kewarganegaraan juga penting untuk dilakukan seumur hidup sesuai dengan konsep *lifelong learning*. Idealnya, kompetensi kewarganegaraan yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai terkait kewarganegaraan bisa berkembang lewat berbagai bentuk pembelajaran yang terus-menerus sehingga masyarakat dapat mengambil bagian sebagai warga negara aktif.

Untuk memonitor kompetensi kewarganegaraan masyarakat, kerangka pengukuran dan indikator mulai banyak dikembangkan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 12). Salah satunya adalah *Civic Competence Composite Indicator* 2 (CCCI-2) yang dikembangkan oleh *Centre for Research on Education and Lifelong Learning* (CRELL). Kerangka pengukuran ini dibuat berdasarkan data hasil penelitian pada anak usia 13-14 tahun sehingga cocok digunakan untuk mengukur kompetensi kewarganegaraan anak muda (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 3). CCCI-2 sendiri merupakan hasil pengembangan dari kerangka serupa yang dikenal dengan nama CCCI (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 41). Berbeda dengan CCCI yang menggunakan indikator dari Civic Education (CIVED) tahun 1999 dalam pembuatan kerangka pengukurannya, indikator dalam CCCI-2 telah mengalami penyesuaian dan pembaharuan dengan mengadaptasi instrumen penelitian dari International Civics and Citizenship Study

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

(ICCS) tahun 2009. Meski memiliki beberapa perbedaan, konsep dan teori yang mendasari kerangka pengukuran CCCI-2 masih sama dengan CCCI. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dari pembuatan kerangka pengukuran pertama dapat digunakan dalam penyusunan CCCI-2.

Dalam pembuatan indikatornya, CCCI-2 menggunakan instrumen dari ICCS 2009 yang disesuaikan dengan dimensi-dimensi dalam European Civic Competence Inventory (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 41). European Civic Competence Inventory terdiri atas empat dimensi, yaitu dimensi hak-hak dasar manusia, kebajikan sipil (*civic virtues*), tanggung jawab, sikap partisipatif, dan dimensi kognitif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 21). Operasionalisasi dimensi-dimensi ini ke dalam kerangka pengukuran CCCI-2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Operasionalisasi dimensi ECCI ke dalam CCCI-2

European Civic Competence Inventory	CCCI-2
Hak-Hak Dasar Manusia • Hak Asasi Manusia • Kesetaraan, khususnya dalam kesetaraan partisipasi politik bagi perempuan, minoritas, dan imigran	• Sikap terhadap kesetaraan gender. • Sikap terhadap kesetaraan hak bagi seluruh suku bangsa/ras. • Sikap terhadap kesetaraan hak bagi imigran.
Kebajikan Sipil (*Civic Virtues*) • Kesadaran dan solidaritas akan sesama, serta semangat publik termasuk dalam perhatian pada lingkungan.	• Penghargaan terhadap partisipasi siswa.
Tanggung Jawab • Menjadi warga negara yang baik	• Pentingnya kewarganegaraan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

dalam kaitannya dengan kewajiban untuk berpartisipasi • Menghormati proses demokrasi	yang baik. • Pentingnya kewarganegaraan dalam kaitannya dengan gerakan sosial. • Nilai-nilai demokrasi.
Sikap Partisipatif • Ketertarikan dan keinginan untuk terlibat dalam seluruh bentuk pengambilan keputusan di semua tingkatan	• Partisipasi politik yang diharapkan dari orang dewasa. • Partisipasi dalam pemilihan umum yang diharapkan dari orang dewasa. • Pengharapan dalam demonstrasi. • Pengharapan dalam partisipasi politik secara informal. • Ketertarikan pada isu-isu politik dan sosial. • Kepercayaan atas peran individu terhadap keberhasilan politik. • Keberhasilan kewarganegaraan siswa. • Persepsi atas pentingnya partisipasi di sekolah.
Dimensi Kognitif • Pengetahuan tentang proses demokrasi, sejarah, dan situasi sosio-politik masa kini • Pemikiran kritis • Keterampilan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penggunaan media sosial baru	• Tes pengetahuan.

Sumber: Hoskins, Villalba, dan Saisana (2012, pp. 22-23)

Berdasarkan pemaparan dimensi kewarganegaraan dari European Civic Competence Inventory dan kerangka pengukuran ICCS, CRELL membagi CCCI-2 ke dalam empat dimensi yaitu dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*citizenship*

values), keadilan sosial, dan sikap terhadap partisipasi –di mana ketiganya masuk ke dalam ranah afektif– serta dimensi pengetahuan dan keterampilan demokrasi yang berada dalam ranah kognitif (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 42).

Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan berbicara tentang menjadi warga negara yang baik, berisi aspek-aspek penting terkait demokrasi dan kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 40). Dimensi ini terdiri atas indikator pentingnya kewarganegaraan konvensional dan gerakan sosial dalam kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 44). Bila dibandingkan dengan European Civic Competence Inventory, dimensi ini setara dengan dimensi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik yang meliputi kewajiban berpartisipasi. (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 22).

Sementara itu, dimensi keadilan sosial mengacu pada nilai dan sikap terkait pentingnya kesetaraan dan kesempatan yang sama, serta rasa tanggung jawab atas tingkah laku terhadap orang lain (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 40). Dimensi ini terdiri atas lima buah indikator yaitu nilai-nilai demokrasi, sikap terhadap kesetaraan hak bagi seluruh suku bangsa, sikap terhadap kesetaraan hak untuk imigran ,sikap terhadap kesetaraan gender, dan sikap terhadap partisipasi di sekolah (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, pp. 44-45, 51-52). Dalam European Civic Competence Inventory, dimensi keadilan sosial dengan indikator sikap terhadap kesetaraan gender, dan kesetaran hak untuk seluruh kelompok masyarakat serta imigran, dapat ditemukan dalam dimensi hak-hak dasar manusia yang terdiri atas hak asasi manusia dan kesetaraan bagi perempuan, minoritas, dan imigran (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 22). Sementara itu, indikator

pandangan mengenai pentingnya partisipasi dalam lingkungan sekolah merupakan hasil operasionalisasi dari dimensi kebajikan sipil (*civic virtues*) terkait kesadaran dan solidaritas akan sesama dan lingkungan yang ditemukan dalam European Civic Competence Inventory. Terakhir, indikator pandangan siswa terhadap nilai-nilai demokrasi merupakan cerminan dari dimensi tanggung jawab dalam European Civic Competence Inventory terkait penghormatan atas proses demokrasi.

Dimensi selanjutnya dalam kerangka pengukuran CCCI-2 adalah sikap terhadap partisipasi yang terdiri dari indikator ketertarikan terhadap isu politik dan sosial, *internal political efficacy,* penyampaian opini, sikap terhadap pemilihan umum, sikap terhadap partisipasi dalam aksi politik, sikap terhadap partisipasi informal dalam politik, dan *citizenship self-efficacy* (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, pp. 45, 53). Dimensi sikap terhadap partisipasi dalam CCCI-2 ini merupakan cerminan dari dimensi dengan nama serupa dalam European Civic Competence Inventory yang berisi ketertarikan dan keinginan untuk terlibat dalam seluruh bentuk pengambilan keputusan di semua tingkatan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 22).

Dimensi terakhir dalam CCCI-2 adalah pengetahuan demokrasi yang merupakan satu-satunya dimensi di ranah kognitif. Untuk mengukur tingkat pengetahuan demokrasi, CCCI-2 menggunakan item-item pertanyaan dari *international cognitive student test* dalam ICCS 2009 (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 33). *Cognitive test* ini berisi pertanyaan seputar prinsip-prinsip kewarganegaraan, masyarakat sipil dan sistem kemasyarakatan, partisipasi sipil,

dan identitas kewarganegaraan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 34). Dalam European Civic Competence Inventory, dimensi pengetahuan demokrasi ada dalam dimensi kongnitif yang mencakup pengetahuan tentang proses demokrasi, sejarah, dan situasi sosio-politik masa kini, pemikiran kritis, serta keterampilan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 23).

Pengukuran tingkat kompetensi kewarganegaraan pada anak muda usia sekolah dapat menjadi metode untuk melihat hasil pembelajaran dan sosialisasi dari pengalaman di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Hasil uji kompetensi kewarganegaraan secara nasional juga dapat memberikan gambaran terkait pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan siswa untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara aktif di usia dewasa nasil. Selain itu, pengukuran kompetensi kewarganegaraan juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran sistem pendidikan dan sosialisasi dalam mempromosikan demokrasi (Hoskins, Villalba, & Saisana, 2012, p. 12).

2.2.4 Siswa sebagai Khalayak Media

Khalayak media adalah produk dari konteks sosial –di mana terdapat kesamaan dalam kebudayaan, pemahaman, dan kebutuhan informasi– dan respon atas ketersediaan pola media tertentu (McQuail, 2011, p. 144). Khalayak disebutkan memiliki ciri-ciri: berjumlah besar yang terdiri atas penonton, pembaca, dan lain-lain, tersebar, heterogen, tidak saling mengenal, dan dapat menjadi objek manipulasi media (McQuail, 2011, pp. 63-64).

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan McQuail soal khalayak, Bungin (2006, pp. 75-76) menyebutkan ciri-ciri khalayak media sebagai berikut:

- Khalayak media terdiri dari jumlah yang besar sehingga sulit untuk diprediksi jumlahnya.
- Khalayak media tidak mengelompok pada wilayah tertentu saja, melainkan tersebar dan terpencar di mana-mana.
- Hubungan antara khalayak media dan media massa pada awalnya tidak interaktif. Namun saat ini, interaksi sudah mulai terjadi. Dengan demikian, khalayak dapat membuat pilihan untuk berinteraksi atau tidak berinteraksi dengan media massa.
- Khalayak media terdiri atas berbagai lapisan masyarakat yang sangat heterogen sehingga tidak dapat dikelompokan berdasarkan segmentasi tertentu.
- Khalayak media cenderung tidak terorganisir dan bergerak sendiri-sendiri.

Dalam penelitian ini, siswa SMA yang merupakan responden penelitian bertindak sebagai khalayak media. Dengan rentang usia 16-18 tahun, siswa SMA berada dalam masa remaja. Sebagai remaja, siswa SMA senantiasa belajar mengenali realitas dunia dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat sebagaimana digambarkan oleh media. The Habibie Center (2010) menyebutkan bahwa dalam menggunakan media, remaja pada dasarnya memiliki sifat penasaran, mudah dipengaruhi, dan cenderung menerima begitu saja isi media. Namun di sisi lain,

remaja disebutkan oleh Zimic (2009) sebagai orang yang akrab dengan teknologi dan tidak takut dengan hal-hal baru (Arianto & Indriastuti, 2018, p. 3).

2.3 Hipotesis Penelitian

Hubungan antara tingkat literasi media dan informasi dengan kompetensi kewarganegaraan pada siswa SMA di Tangerang.

H_0 = Tidak terdapat hubungan antara tingkat literasi media dan informasi dengan kompetensi kewarganegaraan pada siswa SMA di Tangerang.

H_a = Terdapat hubungan antara tingkat literasi media dan informasi dengan kompetensi kewarganegaraan pada siswa SMA di Tangerang.

2.4 Alur Penelitian

Demokrasi suatu negara tidak bisa bertahan hanya dengan mengandalkan institusi pemerintah, tapi memerlukan partisipasi aktif warga negara. Untuk menjadi warga negara aktif dibutuhkan serangkaian kompetensi yang disebut kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan terdiri atas dimensi nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan sosial, sikap terhadap partisipasi, dan pengetahuan demokrasi.

Untuk memperoleh kompetensi kewarganegaraan, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk mengakses, mengolah, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi. Serangkaian kemampuan tersebut dikenal dengan sebutan literasi media dan informasi. Dengan literasi media dan informasi, masyarakat memiliki lebih banyak pengetahuan sehingga dapat turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang menguntungkan

Hubungan tingkat literasi..., Levana Florentia, FIK UMN, 2019

kepentingan umum. Oleh sebab itu, pendidikan literasi media dan informasi dibutuhkan.

Pendidikan literasi media dan informasi diberikan melalui institusi pendidikan kepada para siswa dengan harapan bahwa mereka akan menyebarluaskan literasi media dan informasi ini sehingga dapat membawa perubahan yang positif pada masyarakat. Untuk menentukan program pendidikan yang sesuai dengan kondisi siswa, maka dibutuhkan data terkait tingkat literasi media dan informasi serta tingkat kompetensi kewarganegaraan para siswa tersebut. Selain itu, diperlukan juga bukti valid adanya hubungan antara literasi media dan informasi dengan kompetensi kewarganegaraan. Dengan berlandaskan pada alasan-alasan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

Gambar 2.1 Alur Penelitian

Sumber: Olahan peneliti

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA